

MENENGGOK SEJENAK PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI RI DI MASA ORDE BARU.

Oleh : Reni Windiani

PENDAHULUAN.

Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif memberikan peluang yang besar untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan seluruh negara di dunia ini baik negara-negara non komunis maupun negara-negara komunis.

Tulisan ini bermaksud menggambarkan secara garis besar kebijakan yang ditempuh oleh Orde Baru dalam menjalankan politik luar negeri bebas-aktif beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya kebijakan tersebut.

POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF DAN ORDE BARU.

Pada intinya azas politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia baik pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru adalah sama saja yaitu asas bebas dan aktif. Asas ini secara resmi dimulai dengan pernyataan pemerintah yang disampaikan oleh Bung Hatta selaku perdana menteri pada tanggal 2 September 1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) di Yogyakarta. Politik luar negeri bebas-aktif mengandung pengertian sebagai berikut : bebas berarti bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila, sedangkan aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya Indonesia tidak bersikap pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersikap aktif.

Orde Baru yang lahir sebagai reaksi atas beberapa kegagalan yang dialami orde sebelumnya, dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif berpedoman dan berpegangan pada Ketetapan MPRS No. XII/1966; bebas-aktif, anti imperialisme dan anti kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia; berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial; mengabdikan kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Persoalan praktis yang langsung dihadapi pada masa awal Orde Baru yang berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif ialah bagaimana mengatasi warisan ekonomi era Orde Lama terutama inflasi yang tinggi melebihi 500 persen pada tahun 1965 dengan harga beras yang meningkat sebanyak 900 persen. Hutang luar negeri mencapai jumlah kira-kira 2,400 juta dollar AS. Diperkirakan bahwa pada tahun 1966 penerimaan luar negeri dan pembayaran bunga hutang luar negeri akan mencapai jumlah masing-masing 430

juta dan 530 juta dolar AS. Sehubungan dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka pada awal Orde Baru arah kebijakan politik luar negeri ditujukan untuk membantu usaha menanggulangi keadaan ekonomi dan keuangan yang parah tersebut.

Untuk menangani krisis ekonomi, langkah awal yang dilakukan Orde Baru adalah mencari dana dari luar negeri. Bagi Orde Baru dana tersebut sudah tidak mungkin lagi didapat dari negara-negara Komunis yang semasa Demokrasi Terpimpin menjadi sumber bantuan luar negeri karena pengalaman pahit dengan dunia Komunis (khususnya dalam hal ini adalah RRC) yaitu dengan meletusnya G.30.S/PKI. Di samping itu disebabkan pula oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : kemampuan negara-negara Komunis untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia jauh lebih kecil daripada kemampuan negara-negara Barat dan Jepang, kerjasama dengan negara-negara Komunis bisa membantu/memberi angin kepada usaha untuk menghidupkan kembali Komunisme dalam bentuk baru.

Hal di atas ini, menyebabkan Orde Baru lebih banyak membuat perjanjian dengan negara-negara Barat dan Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan akan dana guna menyehatkan kembali situasi keuangan negara. Di samping itu rupa-rupanya negara-negara Barat dan Jepang tampak lebih tanggap terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia sehingga dalam tahun 1966 mereka membentuk konsorsium, IGGI, untuk secara bersama-sama membantu Indonesia keluar dari kesulitannya yang terwujud dalam jumlah bantuan dan pinjaman secara besar-besaran kepada Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun bentuk bantuan yang diberikan pada waktu itu antara lain ialah : dengan Jerman Barat terjalin perjanjian mengenai konsolidasi bantuan hutang dan modal, bantuan keuangan, dan perlindungan penanaman modal; dengan Perancis dicapai kesepakatan tentang pemberian kredit; dengan Amerika dilakukan persetujuan pinjaman modal disamping itu diadakan pula persetujuan-persetujuan terpisah dengan badan-badan non pemerintah di AS antara lain yaitu dilakukan perjanjian bantuan modal dengan Bank Exsport-Import AS.

Orde Baru yang menitik beratkan pada pembangunan di bidang ekonomi dan stabilitas di dalam negeri, berhasil mengatasi krisis ekonomi Indonesia, bahkan secara makro pertumbuhan ekonomi selama th. 1970-awal 1980 cukup tinggi sehingga Indonesia keluar dari status negara termiskin ke menengah. Keberhasilan tersebut dilihat dari segi hubungan luar negeri Indonesia khususnya dari perspektif ekonomi nampak bahwa andil negara-negara Barat dan Jepang melalui perdagangan dan penanaman modal serta bantuan luar negeri sangat menonjol; sedangkan dari negara Sosialis/Komunis sangat kecil, di samping keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang

nggi tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari andil minyak bumi yang dalam kurun waktu itu mengalami berbagai peningkatan harga yang dramatis.

Dari fakta tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa Orde Baru dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dari tahun 1966 hingga 1980-an mengambil kebijakan berhubungan erat dengan negara-negara Barat dan Jepang, dan meninggalkan hubungan erat dengan negara-negara Sosialis/komunis.

KEBIJAKAN BARU DALAM PELAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI RI.

Setelah puluhan tahun lamanya di bawah Orde Baru pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif condong ke Barat, maka menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an terlihat usaha-usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Sosialis/komunis. Hal itu dapat kita amati dari beberapa peristiwa seperti misalnya kunjungan misi dagang Indonesia ke Uni Soviet dan negara-negara Eropa timur, kunjungan misi ADIN ke RRC yang kemudian membuahkan suatu hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan RRC, serta serangkaian kunjungan resmi Presiden Suharto sendiri ke negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet.

Di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan Orde Baru mengambil langkah-langkah seperti tersebut di atas.

Faktor pertama, ialah adanya krisis minyak bumi. Seperti kita ketahui, sektor migas adalah merupakan sektor yang selama ini menjadi andalan selain bantuan luar negeri bagi pembangunan yang sedang dilaksanakan Orde Baru. Dengan terjadinya krisis minyak bumi, Orde Baru menjadi cukup repot mencari alternatif pengganti sumber dana bagi pembangunan yang selama beberapa dekade diperoleh dari hasil minyak bumi.

Faktor kedua ialah adanya kelesuan pasar bahan mentah. Sebagai negara dunia ketiga, seperti juga negara dunia ketiga lainnya, maka bahan mentah adalah merupakan komoditi ekspor yang utama. Kelesuan pasar bahan mentah secara langsung mengurangi devisa negara dalam jumlah yang tidak kecil.

Faktor ketiga ialah adanya kecenderungan negara-negara besar seperti AS untuk mengadakan proteksionisme dalam perdagangan internasional, khususnya dalam hal ini yang ada kaitannya dengan Indonesia ialah adanya pembatasan import tekstil yang berasal dari Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan juga mengingat pasaran AS bagi industri tekstil Indonesia merupakan pasaran terbesar yaitu sekitar 600 juta dolar AS setahun.

Tiga faktor tersebut di atas, erat kaitannya dengan adanya perubahan ekonomi dunia. Sebagai salah satu negara yang menganut ekonomi terbuka, Indonesia sangat peka terhadap perubahan ekonomi dunia. Perubahan ekonomi yang terjadi khususnya

di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia secara cepat atau lambat mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia.

Faktor Keempat yang mempengaruhi Orde Baru menjalankan kebijakan baru dalam pelaksanaan politik luar negeri RI ialah karena adanya perubahan dalam hubungan internasional yang ditandai dengan semakin mudarnya issue mengenai pertentangan ideologi. Perbedaan ideologi antara kedua negara adidaya yaitu AS dengan Uni Soviet, sudah bukan merupakan masalah sentral lagi dalam hubungan internasional. Fenomena yang nampak sekarang ini ialah adanya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain yang berakibat semakin diperlukannya suatu hubungan dan kerjasama antar negara-negara tanpa dibatasi oleh ideologi yang dianutnya.

Adanya faktor-faktor tersebut di atas, wajarlah kiranya apa yang telah dilakukan oleh Orde Baru dalam kebijakan politik luar negerinya mengingat politik luar negeri suatu negara pada hakekatnya adalah merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Agar pembangunan nasional yang merupakan salah satu kepentingan nasional dapat terus berlangsung dan sukses, maka pelaksanaan politik luar negeri RI yang selama ini hanya berorientasi ke Barat dan Jepang saja harus diubah mengingat dana yang dibutuhkan untuk pembangunan amat besar, sehingga Indonesia perlu untuk mencari sumber dana dari negara lain, selain negara-negara Barat dan Jepang. Salah satu usaha yang telah ditempuh ialah meluaskan pasar bagi barang-barang komoditi ekspor Indonesia ke negara-negara Eropa Timur, RRC, dan Uni Soviet. Untuk kelancaran usaha tersebut, maka mau tidak mau Indonesia harus membina hubungan baik dengan mitra dagangnya yang baru itu.

PENUTUP/KESIMPULAN.

Sebagai penutup tulisan ini penulis berpendapat bahwa apa yang selama ini dilakukan Orde Baru dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif jika kita memakai ukuran kepentingan nasional, maka hubungan dekat atau kecondongan Indonesia ke blok Barat dan Jepang selama ini bukanlah suatu bentuk penyelewengan dari politik bebas-aktif karena pada dasarnya asas politik bebas aktif tidak sama dengan prinsip "equidistance" yang menghendaki suatu posisi tengah jarak yang sama antara dua blok. Sedangkan kebijakan baru yang ditempuh Orde Baru dalam pelaksanaan politik luar negeri yaitu menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa Timur, Uni Soviet, dan RRC adalah merupakan pilihan yang logis mengingat politik luar negeri yang bebas dan aktif ditujukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan dipengaruhi oleh persepsi mengenai lingkungan yang sedang dihadapi.

Pada intinya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang mengabdikan pada kepentingan nasional, perlu tetap dilandasi oleh realisme dan pragmatisme. Perubahan

kebijakan yang ditempuh dalam suatu periode adalah demi kepentingan nasional periode tersebut, dan perubahan kebijakan itu haruslah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. ***

SUMBER BACAAN :

1. Leifer, Michael, Indonesia's Foreign Policy, terjemahan, Gramedia, Jakarta 1986
2. Dokumentasi C515, RI - RRC, C515, Jakarta, Juli 1985.
3. Sumpena Prawirasaputra, Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1984.
4. Litbang Deplu dan FISIP UI, Laporan Penelitian Masalah Kecenderungan Perjanjian Internasional dan Sikap Politik Indonesia, Jakarta, Mei 1984.
5. Analisa, Tahun XIV, No 8, Agustus, 1985.
6. -----, Tahun XVI, No.3, Maret 1987.
7. Kompas, 6 April 1990.